



# **LAPORAN KINERJA**

**BAGIAN PEREKONOMIAN DAN  
SUMBER DAYA ALAM  
SEKRETARIAT DAERAH KAB. JEMBER**

**TAHUN 2021**

TAHUN 2022

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Jember disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Jember ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2021. Laporan Kinerja Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Jember berfungsi sebagai alat penilaian kinerja dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta dapat berfungsi sebagai instrument pengendali peningkatan kinerja unit kerja di Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Jember. Kinerja Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Jember diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021.

Januari 2021

KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA  
SEKRETARIAT DAERAH

**WADAATUL MABRUOH, SP**

Penata Tk. I

NIP. 19741230 199901 2 001

## DAFTAR ISI

|  | Hal |
|--|-----|
| KATA PENGANTAR .....   | i   |
| DAFTAR ISI.....  | ii  |
| IKHTISAR EKSEKUTIF.....  | iii |
| BAB I PENDAHULUAN .....  | 1   |
| A. LATAR BELAKANG .....  | 1   |
| B. MAKSUD DAN TUJUAN .....   | 2   |
| C. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI.....  | 2   |
| <br>   |     |
| BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....   | 4   |
| A. RENCANA STRATEGIS .....   | 4   |
| B. RENCANA KINERJA TAHUNAN .....   | 6   |
| C. PERJANJIAN KINERJA .....  | 9   |
| <br>   |     |
| BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA. ....   | 11  |
| A. PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJATAHUN 2021.....  | 11  |
| B. EVALUASI dan ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....  | 12  |
| C. AKUNTABILITAS KEUANGAN .....  | 19  |
| <br>   |     |
| BAB IV. PENUTUP. ....  | 23  |
| <br>   |     |
| LAMPIRAN   |     |
| <b>Lampiran 1. Matriks Rencana Strategis (RS) 2016-2021</b>                                      |     |
| <b>Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021</b>                                      |     |
| <b>Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja<br/>Perubahan tahun 2021</b> |     |
| <b>Lampiran 4. Lampiran SK IKU OPD</b>   |     |
| <b>Lampiran 5. Penghargaan yang diraih selama tahun 2021 (jika ada)</b>                          |     |

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam tahun 2021 merupakan laporan kinerja atas target kinerja yang tercantum dalam Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Tahun 2016-2021 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Tahun 2021

Perubahan Renstra tersebut telah mengakomodir perubahan pada Tujuan dan Sasaran Strategis Kabupaten Jember berdasarkan Rekomendasi Tim SAKIP Kabupaten Jember untuk meringkas dan memilih sasaran yang sangat strategis berikut Indikator Kinerja Utamanya. Sehingga Renstra awal yang semula tidak memiliki indikator tujuan melakukan perubahan rumusan sasaran dan indikator sasaran. Perubahan tersebut tercantum dalam (Tabel 4.1 ) Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

Tujuan yang merupakan kondisi yang diharapkan dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lambat dalam periode s.d tahun 2021, yang meliputi:

1. Terwujudnya kebijakan, Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pembinaan Administrasi Bagian Perekonomian

Capaian Kinerja sasaran tahun 2021 yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran IKU atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam tahun 2016-2021, dapat diuraikan sebagai berikut :

*Sasaran 1* : Peningkatan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pembinaan Administrasi Bagian Perekonomian mendapat predikat nilai **Baik**. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 4 (empat) indikator sasaran, dengan capaian 4 (empat) indikator dengan capaian tergolong **Baik**

Dari uraian capaian indikator dapat disimpulkan bahwa target dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan

pelayanan kepada masyarakat oleh Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Jember telah dengan baik, dimana sebanyak 94% indikator capaian diatas target yaitu dalam kategori **Baik**.

Untuk mendukung pencapaian kinerja tahun 2021 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan mengalokasikan dana dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar 100% merupakan Belanja Langsung atau sebesar Rp. 26.988.593.500,00 dan Belanja Tidak Langsung sebesar 0% atau sebesar Rp 0,00.

Sedangkan realisasi belanja langsung sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 20.461.684.600,00 atau 75,81% dari pagu anggaran. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 yang disampaikan dibawah ini merupakan data sementara dan belum diaudit oleh BPK.

Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaporan dan pengukuran target-target sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 2021 antara lain:

1. Tidak terpenuhinya target pelaksanaan Pameran Produk Lokal disebabkan adanya pandemi Covid 19 dan adanya kebijakan PSBB sehingga beberapa agenda pameran yang aka diikuti dibatalkan oleh penyelenggara.
2. Tidak terpenuhinya target penyaluran BLT Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh pabrik Rokok disebabkan karena terbatasnya waktu identifikasi dan verifikasi data calon penerima BLT.

Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Koordinasi dengan Dinas Teknis berkaitan dengan strategi promosi produk lokal baik *online* maupun *offline*.
2. Identifikasi dan verifikasi data calon penerima BLT Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh pabrik Rokok dilaksanakan lebih awal.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI. No. XI / MPR / 1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan salah satu asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit di Lingkungan Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

Kinerja Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator

keberhasilan pencapaian sasaran strazztegis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam tahun 2021.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Laporan Kinerja Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam dimaksudkan untuk menyampaikan capaian kinerja Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan

Tujuan penyusunan Laporan kinerja Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam adalah :

- sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam dalam rangka meningkatkan kinerja Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam dan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik.

## **C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM**

Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 1 tahun 2021 sebagai berikut :

1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam merupakan unsur staf
2. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh Kepala Bagian
3. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Sekretariat Daerah serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Jember

4. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis;
  - b. pelaksanaan kebijakan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
  - d. pelaksanaan administrasi Bagian; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.
5. Susunan organisasi Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam terdiri dari :
  - a. Kepala Bagian
  - b. Sub Bagian Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil
  - c. Sub Bagian Pengendalian, Distribusi Perekonomian dan SDA
  - d. Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS**

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Diharapkan dengan adanya Perencanaan Strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Rencana Strategis Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam telah dituangkan dalam Dokumen Perubahan Rencana Strategis OPD Kabupaten Jember Tahun 2016-2021.

Masing-masing komponen Rencana Strategis tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

##### **1. Visi dan Misi Kabupaten Jember**

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam merupakan salah satu OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember yang mendukung pencapaian Visi Pembangunan Jember 2016-2021 yaitu: “Jember Bersatu Menuju Masyarakat Makmur, Sejahtera, Berkeadilan Dan Mandiri “

Yang diwujudkan melalui tiga misi, yaitu :

- 1) Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
- 2) Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Yang Berkeadilan
- 3) Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kerakyaratan Yang Mandiri dan Berdaya Saing, Berbasis Agrobisnis/Agroindustri, dan Industrialisasi Secara Berkelanjutan

## **2. Tujuan dan sasaran** Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Dalam rangka menunjang pencapaian sasaran Strategis Kabupaten yang ke 3 (tiga) yaitu Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Yang Mandiri dan Berdaya Saing, Berbasis Agrobisnis/Agroindustri, dan Industrialisasi Secara Berkelanjutan.

Tujuan yang dirumuskan sebagai kondisi jangka menengah yang akan dicapai yaitu :

Tujuan 1: Terwujudnya kebijakan, Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pembinaan Administrasi Bagian Perekonomian

Dengan Sasaran: Peningkatan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pembinaan Administrasi Bagian Perekonomian

## **4. Strategi dan Kebijakan Untuk Mencapai Tujuan Dan Sasaran**

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kabupaten Jember menetapkan strategi berupa kebijakan dan program yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

- Misi (2) “Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang Mandiri dan Berdaya Saing, Berbasis Agrobisnis/Agroindustri dan Industrialisasi secara Berkelanjutan”,
  - Tujuan (2.1) Meningkatkan aktivitas ekonomi dan kualitas kelembagaan UMKM dan Koperasi,
    - Pada sasaran (2.1.1) Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat
      - Kebijakan yang diambil: Meningkatkan penggunaan DBHCHT untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku  
Program yang akan dilaksanakan adalah:
        - a. Program Perekonomian dan Pembangunan
      - Kebijakan yang diambil: Meningkatkan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi  
Program yang akan dilaksanakan adalah:

- a. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
- Kebijakan yang diambil: Memfasilitasi & mengkoordinasi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah  
Program yang akan dilaksanakan adalah:
  - a. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri;
- Kebijakan yang diambil: Mengendalikan laju inflasi di Kabupaten Jember melalui kerjasama antar daerah dan koordinasi antar OPD  
Program yang akan dilaksanakan adalah:
  - a. Program Perekonomian dan Pembangunan.
  - b. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

## **B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2021**

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik, yang akan dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kabupaten Jember melalui berbagai kegiatan di tahun 2021

Dokumen rencana kinerja ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2021, indikator kinerja sasaran, dan target sasarnya, program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya.

### **1. Sasaran dan Indikator Sasaran**

Ada 1 sasaran Bagian Perekonomian dan SDA pada Tahun Anggaran 2021 yaitu :

Indikator Sasaran : 1. Jumlah Pameran yang diikuti

2. Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Kabupaten/Kota

3. Jumlah Seleksi Direksi BUMD yang terlaksana

#### 4. Prosentase Penyaluran BLT terhadap Burh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok

## 2. Program dan Indikator Program

Program-program utama yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan target sasaran Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Tahun 2021 sebanyak 4 (empat) program utama yaitu :

a. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Indikator Program : Prosentase terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pendistribusian pupuk bersubsidi

b. Program Penggunaan dan Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Indikator Program : Jumlah pameran yang diikuti

c. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Program : Prosentase capaian di bidang administrasi perkantoran yang mendukung pelayanan publik

d. Program Perekonomian dan Pembangunan

Indikator Program : Prosentase Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi serta Pembinaan Administrasi Bagian Perekonomian dan SDA

## 3. Kegiatan dan Indikator Kegiatan

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kabupaten Jember sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam selama Tahun 2021 sebanyak 9 (sembilan) kegiatan yaitu :

a. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting terdiri kegiatan-kegiatan :

1. Kegiatan : Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kegiatan (output/keluaran) : Prosentase terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pendistribusian pupuk bersubsidi

b. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri terdiri kegiatan-kegiatan :

1. Kegiatan : Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Indikator Kegiatan (output/keluaran) : Jumlah pameran yang diikuti

c. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri kegiatan-kegiatan :

1. Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah

Indikator Kegiatan : Prosentase tersajinya dokumen perencanaan Bagian Perekonomian dan SDA

2. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator Kegiatan : Prosentase pemenuhan kebutuhan dasar Bagian Perekonomian dan SDA

3. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator Kegiatan : Prosentase pemenuhan kebutuhan dasar Bagian Perekonomian dan SDA

4. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Kegiatan : Prosentase pemenuhan kebutuhan dasar Bagian Perekonomian dan SDA

5. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Kegiatan : Prosentase pemenuhan kebutuhan dasar Bagian Perekonomian dan SDA

d. Program Program Perekonomian dan Pembangunan terdiri kegiatan-kegiatan :

1. Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian

Indikator Kegiatan : Prosentase Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi serta Pembinaan Administrasi Bagian Perekonomian dan SDA

2. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator Kegiatan : Prosentase terlaksananya ketentuan peraturan perundang-undangan di Bidang Cukai

Matriks hubungan sasaran, Indikator Sasaran, Program, Indikator Program, Kegiatan dan Indikator Kegiatan pendukung pencapaian target sasaran, tertuang dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagaimana terlampir.

### C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya.

Pada lampiran Perjanjian Kinerja Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Tahun 2021 dicantumkan sasaran-sasaran strategis dinas, indikator kinerja, target kinerja, dan program-program utama yang dilaksanakan untuk mewujudkan sasaran serta anggaran yang disediakan.

| NO | SASARAN STRATEGIS                                      | INDIKATOR KINERJA  | TARGET       |
|----|--|--|--------------|
| 1  | Meningkatnya Efektifitas kebijakan Bidang Perekonomian | Jumlah Pameran yang diikuti  | 4 kali       |
|    |  | Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Kabupaten/Kota | 31 kecamatan |
|    |  | Jumlah Seleksi Direksi BUMD yang terlaksana  | 1 kali       |
|    |  | Prosentase Penyaluran BLT terhadap Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh pabrik Rokok                 | 100%         |

#### D. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama OPD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban.

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam:

| KINERJA UTAMA/<br>SASARAN STRATEGIS                    | INDIKATOR KINERJA UTAMA  | PENJELASAN/<br>FORMULASI PENGHITUNGAN   | SUMBER DATA  | PENANGGUNG JAWAB                       |
|--|--|---|--|--|
| Meningkatnya Efektifitas kebijakan Bidang Perekonomian | Jumlah Pameran yang diikuti  | <u>Jumlah Pameran yang diikuti tahun ini</u><br>Jumlah Penawaran pameran Tahun ini                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bag. Perekonomian</li> <li>• Disperindag</li> <li>• Dinas Koperasi Usaha Mikro</li> <li>• Dinas Ketahanan Pangan dan Perternakan</li> <li>• Dinas Perikanan</li> <li>• Dinas TPH dan Pekebunan</li> </ul> | Bag. Perekonomian dan Sumber Daya Alam |
|  | Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Kabupaten/Kota | <u>Jumlah Kecamatan yang telah dimonitoring</u><br>Jumlah target Kecamatan yang akan dimonitoring | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bag. Perekonomian</li> <li>• Disperindag</li> <li>• Dinas TPH dan Pekebunan</li> </ul>  | Bag. Perekonomian dan Sumber Daya Alam |
|  | Jumlah Seleksi Direksi BUMD yang terlaksana  | <u>Jumlah Seleksi Direksi yang terlaksana</u><br>Jumlah Seleksi Direksi yang direncanakan         | Bag. Perekonomian dan Sumber Daya Alam   | Bag. Perekonomian dan Sumber Daya Alam |
|  | Prosentase Penyaluran BLT terhadap Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh pabrik Rokok                 | <u>Jumlah Penerima BLT</u><br>Jumlah Penerima BLT yang direncanakan                               | Bag. Perekonomian dan Sumber Daya Alam   | Bag. Perekonomian dan Sumber Daya Alam |

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres positif, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Sebaliknya bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres negative, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam dalam merealisasikan target - target yang telah ditetapkan. Penilaian atas hasil pengukuran capaian sasaran menggunakan skala ordinal sebagai berikut :

| No | CAPAIAN KINERJA  | KETERANGAN  |
|----|------------------|-------------|
| 1. | Lebih dari 100 % | SANGAT BAIK |
| 2. | 76 % s/d 100 %   | BAIK        |
| 2. | 55 % s/d 75 %    | CUKUP       |
| 3. | Kurang dari 55 % | KURANG      |

Adapun rincian pengukuran kinerja Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 3.1  
Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2021

| NO. | SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR SASARAN  | TARGET 2021  | REALISASI 2021 | CAPAIAN     |
|-----|---|--|--------------|----------------|-------------|
| (1) | (2)   | (3)  | (4)          | (5)            | (6)         |
| 1   | Meningkatnya Efektifitas kebijakan Bidang Perekonomian<br>Meningkatnyahubungan industrial yang Harmonis | Jumlah Pameran yang diikuti  | 4 kali       | 4 kali         | 100% (Baik) |
|     |   | Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Kabupaten/Kota | 31 kecamatan | 31 kecamatan   | 100% (Baik) |
|     |   | Jumlah Seleksi Direksi BUMD yang terlaksana  | 1 kali       | 11 kali        | 100% (Baik) |
|     |   | Prosentase Penyaluran BLT terhadap Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh pabrik Rokok                 | 100%         | 76%            | 76% (Baik)  |

## B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam tahun 2021 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Laporan Kinerja Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Tahun 2021, dilakukan evaluasi dan analisis capaian terhadap 4 indikator kinerja

dari 1 sasaran. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran disajikan sebagai berikut :

**I. Tujuan (2.1) Meningkatkan aktivitas ekonomi dan kualitas kelembagaan UMKM dan Koperasi**

**Sasaran (2.1.1) Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat**

Tabel 3.2  
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Tahun Sebelumnya

| NO. | SASARAN STRATEGIS                                      | INDIKATOR SASARAN  | REALISASI |          |          |          |          |
|-----|--|--|-----------|----------|----------|----------|----------|
|     |  |  | Th. 2017  | Th. 2018 | Th. 2019 | Th. 2020 | Th. 2021 |
| (1) | (2)  | (3)  | (4)       | (5)      | (6)      | (7)      | (8)      |
| 1   | Meningkatnya Efektifitas kebijakan Bidang Perekonomian | Jumlah Pameran yang diikuti  | 5 kali    | 11 kali  | 16 kali  | 0        | 4 kali   |
|     |  | Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Kabupaten/Kota | 31 kec    | 31 kec   | 31 kec   | 31 kec   | 31 kec   |
|     |  | Jumlah Seleksi Direksi BUMD yang terlaksana  | 0         | 0        | 0        | 0        | 1 kali   |
|     |  | Prosentase Penyaluran BLT terhadap Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh pabrik Rokok                 | 0         | 0        | 0        | 0        | 76%      |

Tabel3.3  
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d.Akhir Periode RENSTRA

| NO. | SASARAN STRATEGIS                                      | INDIKATOR SASARAN  | TARGET AKHIR RENSTRA | REALISASI Th. 2021 | TINGKAT KEMAJUAN |
|-----|--|--|----------------------|--------------------|------------------|
| (1) | (2)  | (3)  | (4)                  | (5)                | (6)              |
| 1   | Meningkatnya Efektifitas kebijakan Bidang Perekonomian | Jumlah Pameran yang diikuti  | 65 kali              | 38 kali            | -40%             |
|     |  | Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Kabupaten/Kota | 31 kec               | 31 kec             | 100%             |
|     |  | Jumlah Seleksi Direksi BUMD yang terlaksana  | 1 kali               | 1 kali             | 100%             |
|     |  | Prosentase Penyaluran BLT terhadap Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh pabrik Rokok                 | 0                    | 76%                | 76%              |

Sumber Data: Data Pengumpulan LKIP pada ESR

Tabel 3.4  
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

| NO. | SASARAN STRATEGIS                                      | INDIKATOR SASARAN  | REALISASI Th.2021 | REALISASI NASIONAL | KET. |
|-----|--|--|-------------------|--------------------|------|
| (1) | (2)  | (3)  | (4)               | (5)                | (6)  |
| 1   | Meningkatnya Efektifitas kebijakan Bidang Perekonomian | Jumlah Pameran yang diikuti  | 4 kali            | -                  | -    |
|     |  | Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Kabupaten/Kota | 31 kecamatan      | -                  | -    |
|     |  | Jumlah Seleksi Direksi BUMD yang terlaksana  | 1 kali            | -                  | -    |
|     |  | Prosentase Penyaluran BLT terhadap Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh pabrik Rokok                 | 76%               | -                  | -    |

*Sumber Data.\* data realisasi nasional tidak tersedia*

Dari tabel diatas rata-rata capaian sasaran sebesar **94%**, sehingga pencapaian sasaran tersebut adalah **berhasil**

Program dan kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung tercapainya kinerja **sasaran1** terdiri dari 3 (tiga) program, 4 (empat) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan, sebagai berikut :

1. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi

|                 | Uraian  | Target                 | Realisasi              | %     |
|-----------------|---|------------------------|------------------------|-------|
| Masukan/Input   | : Anggaran  | 130.499.500            | 95.536.500             | 73,21 |
| Keluaran/Output | : Terpantaunya dan terkoordinasinya pendistribusian pupuk bersubsidi  | 5 kali<br>7 kali monev | 6 kali<br>7 kali monev | 100%  |
| Penjelasan      | : Pada Renstra 2016-2021, kegiatan pendukung sasaran 1 adalah kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Subsidi Pertanian. Dengan adanya perubahan nomenklatur program dan kegiatan berdasarkan Permendagri 90 tahun 2019 tentang |                        |                        |       |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>klasifikasi kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dan Kepmendagri 050-3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, maka nomenklatur kegiatan tersebut berubah menjadi Nomenklatur Sub Kegiatan “Pengawasan Penyalusan dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi”.</p> <p>Pupuk bersubsidi telah tersalurkan 100% sesuai dengan alokasi kuota</p> |
|--|--|

## 2. Program: Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Sub Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota

|                 | Uraian   | Target        | Realisasi     | %     |
|-----------------|--|---------------|---------------|-------|
| Masukan/Input   | : Anggaran   | 1.227.145.500 | 1.090.664.200 | 88,88 |
| Keluaran/Output | : Event Pameran yang diikuti   | 4 kali        | 4 kali        | 100%  |
| Penjelasan      | <p>: Pada Renstra 2016-2021, kegiatan pendukung sasaran 1 adalah kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah. Dengan adanya perubahan nomenklatur program dan kegiatan berdasarkan Permendagri 90 tahun 2019 tentang klasifikasi kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dan Kepmendagri 050-3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, maka nomenklatur kegiatan tersebut berubah menjadi Nomenklatur Sub Kegiatan “Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota”.</p> <p>Keterangan Pelaksanaan Kegiatan : Pameran dilakukan pada tingkat lokal, propinsi dan Nasional sebanyak 4 kali event dengan mendapatkan Prestasi yang diraih dalam Pameran tersebut sebagai berikut :</p> |               |               |       |

|  |   |
|--|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- City of Charm JATIM FAIR 2021 di Surabaya</li> <li>- Juara I Kategori Special Design APKASI OTONOMI EXPO 2021 di Jakarta</li> <li>- Juara II KTNA AGRO Expo 2021 di Yogyakarta</li> <li>- Pemenang I Penataan Stand Terbaik Batik Fashion Fair 2021 di Surabaya</li> </ul> |
|--|---|

### 3. Program Perekonomian dan Pembangunan

#### Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian

#### Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD

|                 | Uraian   | Target  | Realisasi   | %     |
|-----------------|--|---|---|-------|
| Masukan/Input   | : Anggaran   | 395.305.000   | 182.570.000   | 46,18 |
| Keluaran/Output | : Melakukan koordinasi dengan BUMD   | 1 kali seleksi direksi<br>10 kali rapat<br>9 kali monev | 1 kali seleksi direksi<br>10 kali rapat<br>9 kali monev | 100%  |
| Penjelasan      | <p>: Pada Renstra 2016-2021, kegiatan pendukung sasaran 1 adalah kegiatan Pembinaan dan Pengembangan BUMD. Dengan adanya perubahan nomenklatur program dan kegiatan berdasarkan Permendagri 90 tahun 2019 tentang klasifikasi kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dan Kepmendagri 050-3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, maka nomenklatur kegiatan tersebut berubah menjadi Nomenklatur Sub Kegiatan “Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD”.</p> <p>Keterangan Pelaksanaan Kegiatan : dalam melaksanakan koordinasi dengan BUMD pada PDP Kahyangan telah dilaksanakan sebanyak 5 kali rapat, 6 kali monev dan 1 kali seleksi direksi selama 2021</p> <p>Untuk PDAM juga telah dilakukan sebanyak 5 kali rapat koordinasi dan 3 kali monev selama 2021.</p> |   |   |       |

4. Program Perekonomian dan Pembangunan  
 Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian  
 Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian

|                 | Uraian   | Target      | Realisasi  | %      |
|-----------------|--|-------------|------------|--------|
| Masukan/Input   | : Anggaran   | 407.567.000 | 77.113.000 | 18,92% |
| Keluaran/Output | : - Terlaksananya rapat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)  | 5 kali      | 5 kali     | 100%   |
|                 | - Terlaksananya Operasi Pasar Pemberantasan Cukai Ilegal   | 10 kali     | 10 kali    | 100%   |
| Penjelasan      | : Pada Renstra 2016-2021, kegiatan pendukung sasaran 1 adalah kegiatan Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah. Dengan adanya perubahan nomenklatur program dan kegiatan berdasarkan Permendagri 90 tahun 2019 tentang klasifikasi kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dan Kepmendagri 050-3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, maka nomenklatur kegiatan tersebut berubah menjadi Nomenklatur Sub Kegiatan "Pengendalian dan Distribusi Perekonomian".<br>Keterangan Pelaksanaan Kegiatan :<br>- Rapat koordinasi dilakukan oleh BI bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) sebanyak 5 kali<br>- Operasi Pasar Pemberantasan Cukai Ilegal dilakukan bersama Bea Cukai, Disperindag dan Sat Pol PP sebanyak 10 kali |             |            |        |

5. Program Perekonomian dan Pembangunan  
 Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian  
 Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil

|                 | Uraian   | Target     | Realisasi  | %      |
|-----------------|--|------------|------------|--------|
| Masukan/Input   | : Anggaran   | 25.240.000 | 23.355.000 | 92,53% |
| Keluaran/Output | : - Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi penagihan kredit mikro dan kecil   | 2 kali     | 2 kali     | 100%   |
|                 | - perjalanan dinas untuk penagihan kredit mikro dan kecil  | 30 kali    | 30 kali    |        |
| Penjelasan      | : Pada Renstra 2016-2021, kegiatan pendukung sasaran 1 adalah kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif. Dengan adanya perubahan nomenklatur program dan kegiatan berdasarkan Permendagri 90 tahun 2019 tentang klasifikasi kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dan Kepmendagri 050-3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, maka nomenklatur kegiatan tersebut berubah menjadi Nomenklatur Sub Kegiatan "Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil".<br>Keterangan Pelaksanaan Kegiatan : Rapat koordinasi dilakukan oleh bersama Bank Jatim sebanyak 2 kali dan perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka penagihan kredit dilakukan sebanyak 30 kali. |            |            |        |

6. Program: Program Perekonomian dan Pembangunan

Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam

Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan

|                 | Uraian                           | Target         | Realisasi      | %      |
|-----------------|----------------------------------|----------------|----------------|--------|
| Masukan/Input   | : Anggaran                       | 24.529.992.500 | 18.769.784.500 | 76,52% |
| Keluaran/Output | : - Terlaksananya kegiatan rapat | 15 kali        | 15 kali        | 100%   |

|            |   |   |              |              |     |
|------------|---|---|--------------|--------------|-----|
|            |   | koordinasi<br>- Tersalurnya BLT<br>Buruh Pabrik<br>Rokok dan/atau<br>Buruh Tani<br>Tembakau   | 53.200 orang | 41.028 orang | 76% |
| Penjelasan | : | <p>Pada Renstra 2016-2021, kegiatan pendukung sasaran 1 adalah kegiatan Pemantauan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai. Dengan adanya perubahan nomenklatur program dan kegiatan berdasarkan Permendagri 90 tahun 2019 tentang klasifikasi kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dan Kepmendagri 050-3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, maka nomenklatur kegiatan tersebut berubah menjadi Nomenklatur Sub Kegiatan “Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan”.</p> <p>Keterangan Pelaksanaan Kegiatan : Kegiatan yang dilakukan untuk penyaluran BLT untuk Buruh Pabrik dan/atau Buruh Tani tembakau sebanyak 41.028 orang.</p> |              |              |     |

## C. AKUNTABILITAS KEUANGAN.

### 1. Alokasi Anggaran OPD

Keseluruhan Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam anggaran tahun 2021 adalah sebesar Rp. 26.988.593.500,- yang terdiri dari:

|    |                     |     |                |                |
|----|---------------------|-----|----------------|----------------|
| a. | Belanja Operasi     |     | Rp.            | 26.988.593.500 |
|    | Belanja Pegawai     | Rp. | 133.800.000    |                |
|    | Belanja Barang/jasa | Rp. | 26.854.793.500 |                |
| b. | Belanja Modal       |     | Rp.            | 0              |
|    | - Belanja Modal     | Rp. | 0              |                |

Proporsi Anggaran pada tahun 2021, Belanja Operasi sebesar 100% dan Belanja Modal sebesar 0%

## 2. Alokasi Anggaran Belanja Per Program

Keseluruhan anggaran belanja langsung per program pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam tahun 2021 terdiri dari:

| No | PROGRAM/<br>KEGIATAN   | ANGGARAN<br>(Rp.) | REALISASI<br>(Rp) | CAPAIAN<br>(%) |
|----|--|-------------------|-------------------|----------------|
| 1  | <b>Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting</b>                         | 130.499.500       | 95.536.500        | 73,21          |
|    | <i>Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>         | 130.499.500       | 95.536.500        | 73,21          |
|    | Sub Kegiatan Pengawasan dan Penyaluran Pupuk dan Pestisida Bersubsidi                              | 130.499.500       | 95.536.500        | 73,21          |
| 2  | <b>Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri</b>  | 1.227.145.500     | 1.090.664.200     | 88,88          |
|    | <i>Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</i>      | 1.227.145.500     | 1.090.664.200     | 88,88          |
|    | Sub Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota          | 1.227.145.500     | 1.090.664.200     | 88,88          |
| 3  | <b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>                                 | 272.844.000       | 222.660.000       | 81,61          |
|    | <i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah</i>                  | 11.188.500        | 11.188.500        | 100,00         |
|    | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | 9.030.000         | 9.030.000         | 100,00         |
|    | Sub Kegiatan koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2.158.500         | 2.158.500         | 100,00         |
|    | <i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>   | 207.869.000       | 169.610.000       | 81,59          |
|    | Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 207.869.000       | 169.610.000       | 81,59          |

|          |   |                |                |        |
|----------|---|----------------|----------------|--------|
|          | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah   | 5.000.000      | 5.000.000      | 100,00 |
|          | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | 5.000.000      | 5.000.000      | 100,00 |
|          | <i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>  | 14.221.500     | 11.240.500     | 79,04  |
|          | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | 14.221.500     | 11.240.500     | 79,04  |
|          | <i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>   | 34.565.000     | 25.621.000     | 74,12  |
|          | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 14.055.000     | 5.403.500      | 38,45  |
|          | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 20.510.000     | 20.217.500     | 98,57  |
| <b>4</b> | <b>Program Perekonomian dan Pembangunan</b>   | 25.145.370.000 | 19.038.708.000 | 75,71  |
|          | <i>Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</i>  | 615.377.500    | 268.923.500    | 43,70  |
|          | Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD                            | 182.570.500    | 182.570.500    | 100,00 |
|          | Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian   | 407.567.000    | 77.113.000     | 18,92  |
|          | Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil   | 25.240.000     | 9.240.000      | 36,61  |
|          | <i>Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</i>   | 24.529.992.500 | 18.769.784.500 | 76,52  |
|          | Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan         | 24.529.992.500 | 18.769.784.500 | 76,52  |
|          | <b>TOTAL</b>  | 26.988.593.500 | 20.461.684.600 | 76,82  |

### **3. Alokasi Belanja Per Sasaran Strategis Perangkat Daerah**

Untuk mengetahui proporsi pengalokasian belanja pada program pendukung pencapaian sasaran disajikan dalam tabel Rencana Kinerja Tahunan (RKT) terlampir:

Berdasarkan tabel RKT 2021, dapat diuraikan proporsi alokasi anggaran belanja langsung sebagai berikut:

**a.** Untuk Sasaran Starategis I: Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat

Didukung oleh :

- Program Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Dengan Anggaran Rp. 130.499.500,-
- Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri dengan Anggaran Rp. 1.227.145.500,-
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Anggaran Rp. 272.844.000,-
- Program Perekonomian dan Pembangunan dengan Anggaran Rp. 25.558.114.500,-

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp. 26.988.593.500,- yang dialokasikan untuk sasaran I adalah sebesar 100% dari keseluruhan belanja langsung Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Dalam tahun 2021 Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan guna mencapai target-target sasaran yang ditetapkan. Penyelenggaraan pemerintahan /pembangunan Kabupaten Jember merupakan rangkaian kebijakan, program, kegiatan yang terencana, menyeluruh, dan berkesinambungan guna mewujudkan sasaran pembangunan sebagaimana dituangkan dalam Renstra Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam tahun 2016-2021

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) dikategorikan **Baik** karena dari 4 indikator sasaran pencapaiannya sebanyak 3 indikator dalam kategori baik dan 1 indikator dalam kategori kurang.

Sedangkan realisasi Penyerapan Anggaran sebesar Rp. 20.461.684.600,00 (75,81%) meliputi belanja tidak langsung sebesar Rp 0 (0%) dan Belanja langsung sebesar Rp. 20.461.684.600,00 (75,81%).

Terkait dengan hal tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam masih menghadapi kendala atau hambatan yang berpengaruh terhadap optimalisasi pencapaian target yang ditetapkan.dengan hambatan dan permasalahan sebagai berikut :

1. Tidak terpenuhinya target pelaksanaan Pameran Produk Lokal disebabkan adanya pandemi Covid 19 dan adanya kebijakan PSBB sehingga beberapa agenda pameran yang aka diikuti dibatalkan oleh penyelenggara.
2. Tidak terpenuhinya target penyaluran BLT Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh pabrik Rokok disebabkan karena terbatasnya waktu identifikasi dan verifikasi data calon penerima BLT.

Oleh karenanya perlu dilakukan perumusan rencana aksi yang lebih efektif serta menerapkan langkah-langkah perbaikan untuk meminimalkan kendala yang

ada dalam penyelenggaraan pemerintahan tahun 2021 dan tahun – tahun berikutnya antara lain melalui :

1. Koordinasi dengan Dinas Teknis berkaitan dengan strategi promosi produk lokal baik *online* maupun *offline*.
2. Identifikasi dan verifikasi data calon penerima BLT Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh pabrik Rokok dilaksanakan lebih awal.

Demikian Laporan Kinerja Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2021 sebagai salah satu laporan pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan tahun 2022.